



**PERATURAN KEPALA DESA MEKARSARI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN DESA MEKARSARI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA MEKARSARI ,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Mekarsari Nomor 7 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran

serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara percepatan penanganan Corona Virus deases-19;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Produk Hukum Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11) Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapai Ancaman

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1035);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Deas tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1641);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 149);
28. Pearturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peratutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1496);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 15);

33. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 102 Tahun 2015 tentang Tatacara Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 18);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 11);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 49);
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
39. Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 3);
40. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 55 tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdsarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut tahun 2020 Nomor 55);
41. Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2020 perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah

42. Peraturan Bupati Garut Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Tata cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2021;
43. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2021 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Mekarsari (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2021 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MEKARSARI NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00,
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.890.768.537,00
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.928.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp	1.892.696.537,00

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	595.948.524,00
b.	Bidang Pelaksanaan	Rp	399.407.133,00

Pembangunan Desa

c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	28.100.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	247.029.200,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	622.211.680,00
Jumlah Belanja		Rp	1.892.696.537,00
Surplus/Defisit		Rp	00,0
3. Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.928.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.928.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp	00,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mekarsari .

Ditetapkan di Mekarsari

Pada Tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA MEKARSARI

AGUS NURJAMAN, SE

Diundangkan di Mekarsari

Tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

AI YULIANTI

(BERITA DESA MEKARSARI TAHUN 2022 NOMOR 1)